

KRITERIA PENILAIAN PENENTUAN IBUKOTA PROPINSI

Syarat/Kriteri	Indikator	Sub Indikator
Aspek Ruang	1. Ruang a. Calon Ibukota Propinsi mampu memberikan pelayanan bagi seluruh wilayah Propinsi Baru b. Luas wilayah memadai untuk mendukung aktifitas sosial ekonomi budaya dan politik kabupaten tersebut c. Calon Ibukota Propinsi memiliki pola interaksi yang produktif dengan wilayah hinterlandnya d. Lokasi calon Ibukota Propinsi secara fisik tidak berdekatan dengan Ibukota Propinsi lain/kota e. Mempunyai akses yang baik terhadap potensi sumber daya air	1. Jarak tempuh rata-rata Ibukota Propinsi terhadap Ibukota Kabupaten 2. Rasio luas lahan budidaya terhadap luas lahan daerah 3. Jarak tempuh rata-rata terhadap seluruh Ibukota Kabupaten/Kota 4. Jarak tempuh dengan Ibukota Propinsi lain 5. Jarak sumber daya air dengan pusat permukiman
	2. Luas Daerah	6. Luas wilayah keseluruhan 7. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
Jumlah Penduduk	3. Jumlah Penduduk	8. Jumlah penduduk

KRITERIA PENILAIAN PENENTUAN IBUKOTA PROPINSI

Syarat/Kriteri	Indikator	Sub Indikator
	4. Lebih dari separuh jumlah penduduk bermata pencaharian di sektor non pertanian	9. Rasio jumlah penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan atau SDA dengan total penduduk calon Kabupaten
	5. Tingkat pertumbuhan penduduk tidak minus (-)	10. Pertumbuhan penduduk
	6. Tenaga kerja	11. Rasio jumlah PNS terhadap total penduduk 12. Rasio jumlah tenaga kerja produktif terhadap total penduduk
Potensi Daerah	<i>7. Sarana dan prasarana transportasi</i>	13. Jumlah Pelabuhan udara 14. Jumlah Pelabuhan laut/penyeberangan/sungai 15. Jumlah Terminal 16. Panjang jalan 17. Jumlah mobil 18. Jumlah motor 19. Jumlah kapal motor 20. Jumlah perahu

KRITERIA PENILAIAN PENENTUAN IBUKOTA PROPINSI

Syarat/Kriteri	Indikator	Sub Indikator
	8. Perumahan dan Permukiman	21. Perumahan dinas 22. Perumahan pribadi
	9. Lembaga Keuangan	23. Jumlah bank 24. Jumlah non bank 25. Jumlah KUD 26. Jumlah non KUD
	10. Sarana dan Prasarana Ekonomi	27. Jumlah pasar modern 28. Jumlah pasar tradisional 29. Jumlah toko 30. Jumlah kios
	11. Sarana pendidikan	31. Jumlah SD 32. Jumlah SLTP 33. Jumlah SLTA 34. Jumlah Perguruan Tinggi

KRITERIA PENILAIAN PENENTUAN IBUKOTA PROPINSI

Syarat/Kriteri	Indikator	Sub Indikator
	12. Sarana Kesehatan	35. Jumlah rumah sakit 36. Jumlah puskesmas 37. Jumlah puskesmas pembantu 38. Jumlah apotik/toko obat 39. Jumlah dokter 40. Jumlah paramedis
	13. Sarana Peribadatan	41. Jumlah masjid 42. Jumlah gereja 43. Jumlah pura 44. Jumlah sarana peribadatan lainnya
	14. Sarana Pariwisata	45. Jumlah hotel/akomodasi lainnya 46. Jumlah restoran/rumah makan 47. Jumlah obyek wisata

KRITERIA PENILAIAN PENENTUAN IBUKOTA PROPINSI

Syarat/Kriteri	Indikator	Sub Indikator
	<i>15. Sarana Kegiatan Seni/ Institusi Sosial</i>	<i>48. Jumlah gedung kesenian</i> <i>49. Jumlah panti sosial</i>
	<i>16. Sarana Olah Raga</i>	<i>50. Jumlah lapangan</i>
	<i>17. Sarana Komunikasi</i>	<i>51. Jumlah pelanggan telepon</i> <i>52. Jumlah kantor pos</i> <i>53. Jumlah kantos pos pembantu</i>
	<i>18. Sarana Penerangan</i>	<i>54. Jaringan listrik</i> <i>55. Jumlah pelanggan listrik</i>
	19. Prasarana dan Sarana Dasar	56. Fasilitas pelayanan air limbah 57. Jumlah fasilitas persampahan 58. Jumlah pelanggan air bersih

KRITERIA PENILAIAN PENENTUAN IBUKOTA PROPINSI

Syarat/Kriteri	Indikator	Sub Indikator
Sosial Budaya	20. Organisasi Kemasyarakatan	59. Jumlah organisasi kemasyarakatan
Lain-lain	21. Keamanan dan Ketertiban	60. Angka kriminilitas per 10.000 penduduk
	22. Ketersediaan sarana dan prasarana Pemerinta	61. Jumlah gedung yang ada 62. Ketersediaan lahan untuk gedung pemerintahan

Keterangan :

- Huruf **cetak tebal miring** merupakan penilaian berdasarkan PP no. 129 tahun 2000